



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 843/XII/2014

I/DESEMBER 2014



KOMISI III KUNJUNGI ACEH INVENTARISIR KASUS TIPIKOR



KOMISI III KUNJUNGI ACEH INVENTARISIR KASUS TIPIKOR

Rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Aziz Syamsuddin melakukan kunjungan spesifik dalam rangka menginventarisir kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah dan sedang ditangani, baik oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksaan, serta kasus-kasus apa saja yang telah diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Semua data dan informasi yang diperoleh akan menjadi masukan bagi Komisi III dalam menyusun kebijakan di tingkat pusat,” ujar Aziz kepada wartawan usai pertemuan dengan Kapolda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Aceh, Sabtu (22/11).

Saat ditanya terkait dengan lamanya jabatan atau pos-pos jabatan tertentu di Polda maupun di Kejati yang menjenuhkan, Aziz mengatakan memang banyak hal yang bisa dilakukan terima untuk reward dan punishment terhadap pos-pos jabatan tertentu, baik di tingkat Polda maupun di tingkat Kejati.

Politisi dari Partai Golkar berharap, kiranya rollingnya itu tidak terlalu lama, jangan sampai ada yang menduduki jabatan 4 sampai 7 tahun dalam pos yang sama posisinya. “Itu menimbulkan suatu kejenuhan untuk kinerja daripada institusi tersebut,” ujarnya.

Sementara Kapolda Aceh Husein Hamadi saat ditanya terkait dengan penegakan hukum Tipikor, mengatakan kami sudah berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum khususnya masalah Tipikor. Namun, lanjutnya, yang sudah dilakukan sekarang hanya masalah penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan upaya pencegahan masih kurang, karena selama ini anggaran yang diberikan kepada kita hanya untuk melakukan



Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR berdialog dengan Kapolda dan Kejati Provinsi Aceh

penyidikan.

Husein berharap kepada Komisi III kiranya dapat diberikan tambahan anggaran untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Anggaran tersebut nanti akan digunakan untuk penyuluhan kepada masyarakat terutama ke sekolah-sekolah sehingga anak-anak sekolah dapat memiliki pengetahuan tentang Tipikor.

Dengan demikian menurutnya, generasi penerus suatu saat apabila mereka akan menjadi seorang pejabat atau menduduki suatu jabatan tertentu pasti akan terhindar dari masalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum khususnya di bidang Tipikor. “Ini sangat bagus dan sangat efektif,” tegasnya.

Selama ini pihaknya sudah melakukan penyuluhan berkaitan dengan masalah narkoba dan masalah lalulintas, sedangkan penyuluhan di bidang

Tipikor ini sama sekali memang belum ada, oleh karenanya ke depan diharapkan itu bisa dilaksanakan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh Tarmizi, mengatakan akan mengedepankan dan memaksimalkan pencegahan Tipikor. Tentunya seluruh elemen akan meminimalkan terjadinya kejahatan Tipikor.

Menurutnya, penanganan korupsi yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara sebesar-besar yang dikorupsi.

Kunjungan spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Provinsi Aceh dipimpin Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin (F-PG) disertai sejumlah anggota lintas fraksi yakni Wenny Warouw (F-Partai Gerindra); Ruhut Poltak Sitompul (F-PD); Muslim Ayub (F-PAN); Nasir Djamil (F-PKS); Ali Umri (F-Partai Nasdem); dan Hasrul Azwar (F-PPP). (iw)/foto: iwan armanias/parle/iw.



Ketua DPR Ajak Presiden Bersinergi



Gedung Nusantara V, Senayan Jakarta, Rabu (26/11)

“Tadi malam jam 10 saya telepon beliau. Saya bilang kepada beliau alangkah baiknya pemerintah dan DPR dapat segera bersama-sama membangun bangsa. Pemerintah dipercaya oleh rakyat memerintah negeri ini, dan DPR pun dipercaya oleh rakyat untuk mengawasi pemerintah,” ungkap Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Ditambahkan Novanto, jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut tentu akan menyulitkan kinerja pemerintah sendiri. Karena DPR lah yang memegang fungsi anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.

“Saat itu, Presiden menyambut baik keinginan saya tersebut. Karena jika DPR dan Pemerintah bersinergi dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia,” jelas Novanto.

Ke depannya Novanto meyakini bahwa kondisi pemerintah dan DPR akan berjalan lebih baik lagi, tentu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. (Ayu) foto: rizka/parle/iw

Ketua DPR RI Setya Novanto saat memberi sambutan pada acara pelantikan PIA

Ketua DPR RI, Setya Novanto mengungkapkan telah berkomunikasi kepada Presiden Joko Widodo untuk bersinergi, bersama-sama membangun negeri ini, dengan tugas dan peranan

masing-masing.

Hal tersebut diungkapkannya dalam sambutan pelantikan pengurus PIA (persaudaraan istri anggota) DPR RI Periode 2014-2019 di ruang Pustakaloka,

Izin Freeport Tak Perlu Diperpanjang

PT. Freeport sudah banyak melakukan kerusakan lingkungan di Papua. Biota laut rusak dan laut mengalami pendangkalan akibat limbah produksi tambang dibuang ke lautan. Komisi IV ingin mengeluarkan rekomendasi agar izin Freeport tak perlu diperpanjang.

Demikian penegasan anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo kepada pers sebelum Rapat Paripurna DPR, Rabu (26/11). Selama ini, kata Firman, pemerintah Amerika Serikat kerap mengeritik Indonesia atas kerusakan lingkungan di Kalimantan. Saat ditanya tentang kerusakan lingkungan di Papua oleh Freeport yang merupakan perusahaan asal Paman Sam itu, mereka tak mau bertanggung jawab dengan alasan tidak ada kaitan dengan pemerintah Amerika sendiri.

“Saya pernah ke Kementerian Luar Negeri di Amerika, menemui seorang direktur wilayah Asia. Saya tanyakan



Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo

bagaimana sikap Amerika tentang Freeport? Dia mengatakan perusahaan Freeport tidak ada kaitannya dengan pemerintah Amerika,” ungkap Firman. Mengutip pernyataan pejabat di Kemenlu AS itu, politisi Golkar ini me-

ngatakan, semua perusahaan swasta nasional di AS harus tunduk pada hukum negara tempat berinvestasi.

Kata pejabat Kemenlu AS lagi, Freeport hendaknya mengikuti aturan pemerintah Indonesia. “Dari situ Komisi IV mengeluarkan sikap politik. Kami sudah merekomendasikan bahwa izin Freeport harus ditinjau kembali. Tidak boleh dikasih perpanjangan izin, karena sudah merusak lingkungan,” tegas Firman.

Sayangnya, pemerintah saat ini belum bersikap kritis terhadap persoalan Freeport. Sementara pemerintah daerah, lanjut Firman sudah kritis terhadap Freeport. “Kebijakan pencabutan izin, kan, ada di pusat. DPR telah memberikan rekomendasi agar tidak memberikan izin lagi kepada Freeport. Ini juga merupakan pekerjaan pemerintahan baru.” (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

RUU HDM Tegakkan dan Kembangkan Disiplin TNI



Ketua Komisi I DPR Machfudz Siddiq

Agenda penting yang harus dilakukan Komisi I yang telah menyelesaikan RUU Hukum Disiplin Militer (HDM) adalah mengawal implementasinya. RUU ini penting karena akan menjadi instrumen hukum bagi TNI dalam menegakkan dan mengembangkan disiplin organisasi TNI dan semua unsur prajurit.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi I DPR Machfudz Siddiq di ruang kerjanya Rabu (26/11) siang.

Menurut Machfudz Siddiq, RUU Hukum Disiplin Militer merupakan bagian dari kelanjutan agenda reformasi TNI. Dulu RUU ini didorong untuk mengevaluasi masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oknum prajurit sampai kepada kasus-kasus bentrok antar

prajurit TNI dengan aparat kepolisian. Sebagai langkah maju yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan UU disiplin Militer.

“Dengan penyempurnaan UU Disiplin Militer ini, nanti langkah-langkah yang lebih tegas dan sistematis TNI meningkatnya profesionalisme dapat terwujud,” tegasnya.

Ketua Komisi I juga mengakui masih ada PR yang belum terselesaikan dan ini menjadi prioritas legislasi yaitu revisi UU Penyiaran yang didalamnya termasuk pengaturan mengenai LPP RRI dan TVRI. Masalah itu belum diselesaikan karena belum ada kesepakatan pandangan politik legislasi antara DPR dengan Pemerintah. DPR periode sekarang ini diharapkan ada kesepakatan politik sehingga revisi UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi bisa dilanjutkan.

Menyinggung diplomasi luar negeri, Komisi I mencatat ada capaian yang menarik sejak dua tahun lalu, bersama pemerintah melakukan diplomasi antar Parlemen. Antara lain mengangkat fokus dukungan Indonesia terhadap Palestina. “Kami bertemu dengan Presiden, Perdana Menteri dan Perlemen Palestina mendorong rekonsolidasi nasional dan rekonsolidasi tersebut sekarang sudah disepakati,” ungkap Machfudz.

Peran Indonesia dinilai lebih kuat

dalam konteks pencatutan regional baik di Asean maupun di Asia Pasifik. Menurut Komisi I, dinamika kawasan ini akan mempunyai implikasi kuat ke Indonesia baik secara politik maupun ekonomi bahkan secara militer.

Oleh karena itu, Indonesia selain harus meningkatkan diplomasinya tapi juga memperkuat kapasitas nasionalnya baik secara ekonomi, politik maupun militer sehingga mempunyai kesiapan dalam merespon atau mengantisipasi dinamika kawasan yang makin memanas.

Sedangkan terkait masalah penyiaran, dengan merebaknya industri penyiaran, bukan hanya lembaga-lembaga penyiaran swasta nasional tapi juga mulai masuknya lembaga penyiaran asing, menjadi konsen Komisi I. Secara umum isi siaran di Indonesia belum secara sungguh-sungguh dan terarah bisa mendorong pencapaian kepentingan-kepentingan nasional diantaranya pembentukan karakter bangsa dan pencerdasan masyarakat.

Masih banyak siaran TV yang terjebak pragmatisme sehingga siaran yang ratingnya tinggi dan dapat iklan besar tetapi dari sisi kualitasnya rendah. Masih diperlukan regulasi dan peningkatan kualitas siaran serta membutuhkan komitmen bersama seluruh penyelenggara lembaga penyiaran. (Spy)/foto:andri/parle/iv.

Paripurna Dewan Tunda Pengambilan Keputusan RUU MD3

Rapat Paripurna DPR RI hari ini Rabu (26/11/2014) menunda pengambilan keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (Revisi UU MD3) menjadi RUU Usul DPR RI.

Rapat Paripurna Dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memutuskan pembahasan revisi UU MD3 dikembalikan ke Badan Legislasi, mengingat adanya catatan terhadap

pembahasan revisi UU MD3.

“Ada dua opsi yang pertama kita voting dan kedua ditunda. Kalau ditunda kita setuju?” tanya Fahri Hamzah yang dijawab setuju oleh anggota dewan.

Fahri meminta catatan fraksi yang dikemukakan pada paripurna diselesaikan di Baleg. “Usul saya ini tadi ada banyak catatan, catatan itu harusnya diselesaikan di tingkat Baleg karena kita tidak mau ada UU selesai seminggu dua minggu ke depan, tapi patah

di MK. Kita ingin selesaikan baik-baik prosedural dan tidak ada yang gugat dan dipatahkan,” sambungnya.

Sejumlah fraksi memang menyuarakan agar DPD dilibatkan dalam pembahasan revisi UU MD3.

Anggota Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf memaparkan putusan MK yang mengharuskan dilibatkannya DPD. “Mempertimbangkan amar putusan MK, kami menyarankan untuk ada penundaan untuk menyertakan DPD



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR Sarehwiyono

walau cuma beberapa hari,” ujarnya.

Usulan perubahan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 diajukan oleh 20 orang anggota DPR RI. Hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa “Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh

anggota, komisi, atau gabungan komisi sebagai usul inisiatif.”

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Baleg DPR Sarehwiyono dalam laporannya menyampaikan bahwa usulan terhadap perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 ini belum ada dalam Program Legislasi dan merupakan hasil kesepakatan

Fraksi-fraksi, sedangkan menurut UU setiap pengajuan RUU baik dari DPR, Presiden atau DPD dilakukan berdasarkan Prolegnas.

Usulan perubahan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas.

Menurut Sareh, perubahan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dilakukan secara terbatas sesuai dengan hasil kesepakatan semua fraksi di DPR RI pada tanggal 17 Nopember 2014.

Menindaklanjuti usulan atas RUU MD3, Baleg pada tanggal 20 Nopember 2014 yang lalu telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM.

Dalam rapat kerja tersebut telah disepakati/disetujui RUU tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ditetapkan dalam Prolegnas 2014 masa keanggotaan dewan 2014-2019. (sc)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Ketua DPR Belum Terima Usulan Interpelasi

Ketua DPR Setya Novanto mengakui belum menerima usulan sejumlah anggota DPR yang menggulirkan hak interpelasi. “Sampai hari ini saya belum terima surat terkait pengajuan hak interpelasi, kita lihat nanti setelah diterima dan akan melihat apa yang menjadi persoalannya,” katanya kepada pers Selasa (25/11) sore di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurut Ketua DPR, hak interpelasi adalah hak pribadi anggota DPR, dan berharap kita dapat mencari jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa ini. Bagi Pimpinan DPR, ujar dia, yang berkaitan dengan alokasi subsidi, yang berkepentingan dengan kesejahteraan rakyat seperti kepentingan infrastruktur dan pendidikan serta untuk bea siswa masyarakat miskin, harus dengan persetujuan DPR.

Saat ditanyakan, apakah pimpinan



Ketua DPR RI Setya Novanto

mempersilahkan anggota untuk menggunakan hak itu, Setya Novanto kembali menegaskan, akan melihat apa isi dari interpelasi tersebut.

Secara terpisah, anggota DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya Muhammad Misbakhun mengatakan sebanyak 157 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan dukungan penggunaan hak interpelasi terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hingga Selasa, 157 penanda tangan interpelasi terdiri dari Fraksi Golkar sebanyak 53 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 31 orang, Fraksi Gerakan Indonesia Raya 50 orang dan Fraksi Partai Amanat Nasional 23 orang.

Dijadwalkan, pada Rabu (26/11), penandatanganan hak interpelasi itu akan disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk diproses lebih lanjut. (mp) foto: andri/parle/iw.

Pola Kerja Sama DPR-BPK Akan Diperbarui

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, pertemuan Pimpinan BPK dengan Pimpinan DPR kali ini dalam rangka membicarakan hubungan kerja antara kedua lembaga negara. Diskusinya cukup produktif, dibicarakan pola kerja sama seperti selama ini dimana Keputusan Rapat Paripurna DPR itu wajib ditindaklanjuti oleh BPK.

Hal itu dikatakannya sesuai pertemuan Pimpinan BPK dengan Pimpinan DPR, Selasa (25/11) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Hadir dalam acara ini Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil-wakil Ketua Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah serta Pimpinan Komisi XI. Dari BPK hadir diantaranya Ketuanya Harry Azhar Azis dan anggota Achsanul Qosasi.

Ketua BPK lebih lanjut mengatakan, pihaknya berharap setiap anggota DPR mempunyai kewenangan untuk meminta BPK melakukan pemeriksaan keuangan apakah di Dapilnya atau wilayah pengawasan komisinya. “Diskusinya menarik dan akan memperbarui memorandum of understanding

(MOU) pola kerja sama antara DPR dan BPK,” kata Harry.

Pola kerja sama itu menurut Harry, arahnya adalah akan saling proaktif, kalau DPR fungsinya pengawasan, BPK pemeriksaan. Dia menginginkan misalnya dengan perbaikan pola pengawasan dan pemeriksaan ini maka diharapkan ada perubahan pola kebijakan pemerintah sehingga akan semakin baik dan semakin berkualitas. “Pada akhirnya indikator kemakmuran rakyat itu akan semakin terwujud,” jelas Harry.

Menurut mantan Pimpinan Banggar DPR ini, keuangan negara yang diperiksa BPK sebanyak 130 kementerian dan lembaga dan 524 pemda/gubernur-walikota/kabupaten dan 168 BUMN. Sementara tenaga auditor BPK sekitar 3.000 dari sebanyak 6.000 pegawai BPK. Selama ini mandatnya adalah laporan keuangan dan BPK mau tingkatkan.

Terkait dengan laporan keuangan, Harry menyebutkan bisa saja baik tetapi tidak efisien penyelenggara negara. Masalah ini ada di audit kinerja.



Ketua BPK Harry Azhar Azis

Ditambahkan bahwa peningkatan pola kerja sama juga telah dilakukan dengan DPD sehingga hubungan antara BPK dengan lembaga lain bisa terjalin semakin baik.

“Peningkatan hubungan kedua lembaga akan ditindaklanjuti oleh Sekjen DPR dan Sekjen BPK. Sesuai permintaan Ketua DPR, untuk mengelaborasi pertemuan Pimpinan DPR dan Pimpinan dalam rangka memperbarui pola kerja sama tersebut akan dilakukan secepatnya,” pungkas Harry. (mp), foto : andri/parle/jw.

4 Catatan PKS Terkait Pengambilan Keputusan RUU MD3



Anggota Fraksi PKS Abdul Hakim saat menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS

Fraksi PKS menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 hasil harmonisasi Panja Baleg, namun disertai dengan empat (4) catatan, dimana keempat catatan ini

menjadi hal yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS Abdul Hakim saat membacakan Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS terkait pengambilan keputusan atas RUU MD3 dalam Rapat Pleno Baleg di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11/2014)

Keempat catatan tersebut antara lain : pertama, bahwa proses pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 yang saat ini dibahas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama fraksi-fraksi di DPR yang ditandatangani pada tanggal 17 Nopember 2014 dari ke-14 kesepakatan.

Dimana salah satu butir kesepakatan itu berbunyi : bersepakat dan setuju untuk mengisi penuh anggota Fraksi pada 11 Komisi, 4 Badan dan 1 Majelis Kehormatan Dewan dalam rapat Pari-

purna yang akan dilaksanakan pada Selasa, 18 Nopember 2014. Sehingga secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat ini dapat bekerja sesuai dengan fungsinya secara optimal.

Kedua, Fraksi PKS memahami bahwa setiap RUU yang dibahas di DPR harus diawali dengan program legislasi nasional yang merupakan skala prioritas program pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional sesuai dengan Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Namun pembahasan RUU ini diberikan kekhususan sesuai dengan Pasal 23 huruf (b) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan dalam keadaan tertentu DPR dapat menyusun suatu RUU,” jelas Abdul Hakim.

Ketiga, Fraksi PKS memandang penyusunan draft RUU tentang revisi UU MD3 ini sangat penting untuk



menguatkan sistem pemerintahan presidential yang tertuang dalam konstitusi. Dengan sistem presidential kita meyakini adanya pembagian tugas yang jelas antara lembaga negara sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

“Sistem presidensial dipandang mampu menciptakan pemerintahan negara berazaskan kekeluargaan

dengan stabilitas dan efektivitas yang tinggi,” terangnya.

Keempat, Fraksi PKS mendukung adanya penambahan jumlah setiap alat kelengkapan dewan. Dimana tujuannya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan tugasnya dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan yang mencerminkan repre-

sentasi rakyat.

“Fraksi PKS sangat berharap, bahwa perubahan RUU ini dapat memenuhi harapan masyarakat kepada DPR sebagai institusi politik yang kredible, bermartabat yang dapat menjalankan fungsi dan haknya secara optimal yang didukung oleh manajerial dan kepemimpinan yang baik,” tegasnya. (sc), foto : naefurodjie/parle/iw.

Ketua DPR : Tingkatkan *Trust Building* Pemerintah pada DPR

Ketua DPR Setya Novanto mengaku hingga kini belum menerima surat edaran Sekretaris Kabinet Andi Wijajanto soal larangan para Menteri Kabinet Kerja menghadiri rapat dengan DPR. “Sampai hari belum menerima surat Pak Andi, namun saya berharap antara pemerintah dan DPR ada sinergi yang kuat,” katanya menjawab pers di ruang kerjanya, Gedung DPR, Selasa (25/11).

Sinergi itu kata Setya, karena pemerintah mendapat amanah untuk menjalankan program-programnya bagi kesejahteraan rakyat dan DPR berfungsi melakukan pengawasan kepada Pemerintah. Karena itu Pemerintah hendaknya percaya kepada DPR dan yang harus ditingkatkan adalah *trust building*, kepercayaan kedua belah pihak ini penting karena harus memberikan yang terbaik kepada rakyat.

“Kita dilihat oleh rakyat, karena itu perlu bersama-sama meningkatkan kinerja untuk pembangunan ke depan. Inilah yang harus sesegera mungkin kita sudahi dan melakukan



Ketua DPR RI Setya Novanto

yang terbaik untuk bangsa. DPR bisa menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik dan pemerintah bisa menjalankan program-programnya,” ujarnya.

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk program-program besarnya yang disusun tetap harus meminta persetujuan DPR melalui pembahasan APBN. Bukan hanya program-program yang akan

datang, program sebelumnya seperti percepatan pembangunan pedesaan harus dilaksanakan secepatnya.

Menurut Ketua DPR penandatanganan damai dua kubu telah melalui proses yang lama dan sekarang tidak ada lagi kubu-kubuan, yang ada adalah keluarga besar DPR-RI. Semua itu telah melalui proses panjang dan diharapkan Presiden dapat masukan-masukan yang positif sehingga kerja sama antara DPR dengan Presiden Jokowi-JK bisa dilakukan dengan sinergi.

Saat ditanyakan apakah DPR perlu mengiir surat ke Presiden untuk mencabut surat edaran tersebut, Setya Novanto mengatakan, sampai hari ini pihaknya belum menerima surat edaran Menseskab tersebut. “Jadi saya tidak menanggapi, semuanya bersabar. Yang penting hubungan pemerintah dan DPR bisa berjalan baik serta menjalankan program masing-masing dengan baik pula,” kata Setya Novanto menambahkan. (mp), foto : andri/parle/iw.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memberikan keterangan pers

Komisi II DPR Akan Panggil Mendagri Terkait Server E-KTP

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan Komisi II DPR akan memanggil Mendagri Tjahjo Kumolo untuk dimintai penjelasannya terkait pernyataannya soal informasi server e-KTP yang ada diluar negeri dan akhirnya menghentikan sementara program e-KTP.

“Dalam beberapa waktu itu, kami mendengar dan menyaksikan langsung beberapa statement dan kebijakan

yang dibuat Mendagri yang menurut kami perlu dijelaskan secara tuntas dan jelas,” kata Ahmad Riza Patria dihadapan wartawan usai sidak bersama Pimpinan DPR Fadli Zon dan sejumlah anggota Komisi II DPR, di gedung Dirjen Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil), Jakarta, Selasa (25/11).

Ia menambahkan, agar Mendagri tidak mendapatkan informasi yang salah kemudian disampaikan ke masyarakat, “Bapak Mendagri itu seorang menteri, kami menyarankan untuk lebih berhati-hati menerima informasi, apalagi

menyampaikannya keluar, karena apapun yang disampaikan oleh seorang menteri dapat menjadi miss informasi dan membuat kegaduhan,” jelas Ariza begitu sapaan akrabnya.

Senada dengan Ariza, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap Mendagri harus melakukan klarifikasi yang sesungguhnya apa yang dimaksud dengan server berada diluar negeri, karena pernyataan itu menurut Fadli Zon sangat membingungkan dan tentu saja membahayakan kepentingan nasional, atas kesimpangsiuran berita ini, “Ha-

rus segera diluruskan,”pinta Fadli Zon.

Seperti diketahui dalam penjelasannya, Fadli Zon menerangkan ternyata server e-KTP ada di Jakarta dan Batam, dan sidak kali ini mereka berkesempatan melihat dan mencoba server e-KTP yang ada di Gedung Dirjen Dukcapil, dan diketahui bahwa server e-KTP di Kantor Kemendagri di Medan Merdeka ada 600 terabyte (TB), 35 terabyte di di Gedung Dirjen Dukcapil Kalibata, dan 200 terabyte server cadangan di Batam.(nt), foto: rizka/parle/iw.

Pimpinan DPR Minta BI Hadiri Rapat Kerja di DPR



Pimpinan DPR RI bersama Gubernur BI saat mengunjungi Bank Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) Taufik Kurniawan, menunggu kehadiran Bank Indonesia dalam kesempatan Rapat Kerja (Raker) di Komisi XI DPR yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan.

DPR memberikan apresiasi terhadap independensi BI. Tentunya DPR RI ingin kerja cepat tetapi struktur dan administratifnya tetap harus dilalui dengan baik. “Kami (DPR) mengundang untuk Ketua DPR RI untuk dapat menerima Gubernur BI,” kata Taufik Kurniawan, Senin (24/11), saat men-

emui Gubernur BI Agus Martowardojo, di Gedung BI, Jakarta.

Taufik tidak memungkiri bahwa situasi politik sedang terjadi dinamika, namun ke depan banyak sekali pekerjaan konstitusional antara DPR dengan BI. Menurutnya masalah dinamika politik biarlah diurus teman-teman yang lain, tapi dalam kaitan dengan BI tentunya tidak bisa terlepas dari situasi itu.

“Misalnya terkait asumsi makro, pertumbuhan ekonomi, dampak kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan juga terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015, yang ini

juga merupakan suatu domain Komisi XI. Kami mohon data valite dari BI,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi XI Jon Erizal dari Fraksi Partai Amanat Nasional, bersyukur ada pertemuan antara DPR dan Bank Indonesia, di Gedung BI, Jakarta. Dia telah sejak pelantikan anggota DPR RI berharap bisa langsung bertemu, ada 2 target utamanya yaitu BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena kedua lembaga ini independen.

Menurut Jon, Komisi XI menunggu kehadiran BI, karena banyak sekali informasi-informasi di wilayah tertentu yang nantinya bisa bias. “Kebijakan yang diambil oleh BI untuk menaikkan tingkat suku bunga lalu tidak tersosialisasi dengan baik, ini akan bias sehingga banyak hal-hal yang negatif nantinya,” ungkapnya, sehingga dengan pertemuan ini, dalam waktu dekat bisa digelar di Komisi XI sehingga jajaran BI bisa menyampaikan sekaligus mensosialisasikan strategi tentang hal tersebut ke depan.

Dia juga mengamati tentang pertumbuhan kredit cukup cepat tetapi tidak diimbangi dengan sumber dana, ada beberapa media yang akan dikeluarkan oleh BI untuk mengantisipasi pertumbuhan kredit tersebut. “Ini juga suatu hal yang ditunggu masyarakat banyak. Dan Komisi XI siap mendukung program-program yang Pro-Rakyat,” jelas Jon.

Wakil Ketua Komisi XI Gus Irawan Pasaribu dari Fraksi Partai Gerindra yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, memberikan informasi kepa-

da Gubernur BI Agus Martowardojo, bahwa sebelumnya telah ada pertemuan antara Pimpinan DPR, Komisi XI dan OJK, hasilnya DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Perbankan.

DPR menunggu pembahasan lebih lanjut, karena pada periode yang lalu sudah ada inisiatif terhadap perubahan Undang-Undang tentang Perbankan. “Komisi XI Periode 2014-

2019 akan mengajukan melalui Badan Legislasi (Baleg) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dilanjutkan. Termasuk juga tentang BI yang dengan kehadiran OJK, ada sesuatu yang harus disesuaikan,” jelas Gus Irawan.

Dia ingin mengesampingkan dulu permasalahan politik. “Kita ingin membuktikan bahwa kita kerja, kerja, dan kerja,” tegas Gus Irawan.

Gubernur BI Agus Martowardojo, menyambut baik kehadiran Pimpinan DPR RI yang didampingi Pimpinan Komisi XI, dan berharap bisa bekerjasama lebih baik lagi dengan DPR.

“Tentu ini menjadi harapan kami (BI) juga, dan kami juga akan memperhatikan itu dengan sebaik-baiknya,” tegas Gubernur BI. (as), foto : rizka/parle/iw.

Fadli Zon : Tidak Ada Alasan Hentikan Program e-KTP



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyempatkan simulasi E-KTP

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menghentikan program pendataan e-KTP.

“Meski nanti setelah program ini selesai, yah harus tetap

diteruskan, karena pasti ada orang yang memasuki usia 17 tahun, orang meninggal, kelahiran, jadi pendataan tersebut tidak pernah berhenti kecuali ada kasus luar biasa,” kata Fadli usai melakukan Sidak di Dirjen Dukcapil, Jakarta, Selasa (25/11).

Ia melihat, dalam kasus e-KTP ini, dirinya tidak melihat ada sesuatu yang luar biasa, dan seharusnya menurut Fadli Zon, Mendagri Tjahjo Kumolo melihat sendiri server nya, “Apakah Mendagri sudah datang kesini (Dirjen Dukcapil-red), secara fisik barang server itu ada, apakah dikantornya sendiri sudah lihat yang namanya server itu apa?,” tegasnya.

Apalagi ditambahnya, berdasarkan Keppres Presiden SBY saat masih menjabat, per 1 Januari 2015, e-KTP akan berlaku secara nasional, “Artinya dalam waktu kurang lebih satu bulan, e-KTP akan berlaku secara nasional, pertanyaan apakah Presiden Jokowi akan meralat Keppres itu,” ujar Fadli.(nt),

foto : rizka/parle/iw.

Server E-KTP Ada Di Jakarta dan Batam

Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersama Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR melakukan Sidak ke Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melihat server e-KTP yang ada disana, dan menurut Fadli ternyata server e-KTP ada di Jakarta dan Batam.

“Kedatangan kami kesini (Ditjen Dukcapil-red) ingin melihat langsung server e-KTP, agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan tentang e-KTP dan server, karena beberapa waktu lalu Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pernyataannya, kalau server itu ada di luar negeri,” kata Fadli Zon dihadapan wartawan usai sidak, di Jakarta, Selasa (25/11).

Pada kesempatan ini, Fadli menjelaskan, bahwa server e-KTP di Kantor Kemendagri di Medan Merdeka ada

600 terabyte (TB), 35 terabyte di di Gedung Dirjen Dukcapil Kalibata, dan 200 terabyte server cadangan di Batam.

“Saya kira, setelah kami melihat kesini, saudara Mendagri harus melakukan klarifikasi yang sesungguhnya apa yang dimaksud dengan server berada diluar negeri, karena pernyataan itu menurut saya sangat membingungkan dan tentu saja membahayakan kepentingan nasional atas kesimpangsiuran berita ini, harus segera diluruskan,” pinta Fadli Zon.

Selanjutnya ia juga mempertanyakan, mengenai alasan dari Mendagri



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat meninjau server E-KTP di Dirjen Dukcapil

ri yang menghentikan sementara program e-KTP ini, karena menurut Fadli Zon program ini sangat diperlukan terlepas dari segala macam yang terjadi dibelakangnya.

“Kalau ada kasus-kasus, yah kasus itu diselesaikanlah, tetapi produk dari e-KTP sendiri sebagai *single identity* number sangat diperlukan, sehingga terkonsolidasi,” tegasnya.(nt), foto : rizka/parle/iw.

Legislator Harapkan Kepolisian dan Kejaksaan Imbangi KPK



Komisi III DPR berdialog dengan Kapolda dan Kejati Provinsi Sumut

Komisi III DPR yang membidangi Hukum, Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Keamanan meminta kepada Kejaksaan, Kepolisian dan lainnya sebagai mitra kerja Komisi III harus bisa mengimbangi KPK sebagai lembaga *ad hoc*.

Hal ini dikemukakan anggota Komisi III Ruhut Poltak Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat sesuai pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi III dengan Kapolda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatera Utara (Sumut),

Jum'at (21/11).

“Kalau tidak bisa mengimbangi KPK, lama-lama KPK bukan *ad hoc* lagi,” kata Ruhut seraya menambahkan ini tantangan bagi Kejaksaan dan Kepolisian.

Ruhut menambahkan, KPK sudah berumur 12 tahun dan tahun 2014 ini akan memasuki umur 13 tahun. Karena mereka dengan *ad hoc*-nya tapi nyatanya walaupun sementara mereka sudah bisa merebut dan memenangkan hati rakyat dengan kerja-kerja yang profesional, disiplin dan kerja keras. “Mereka mau mengevaluasi dan berbenah diri yang akhirnya dapat memenangkan hati rakyat dan rakyat senang,” jelasnya.

Berkaitan dengan pemberantasan korupsi, Ruhut menegaskan bahwa pencegahan korupsi itu yang diutamakan. Kita juga harus mencegah supaya tidak banyak lagi perbuatan-perbuatan pidana yang sangat merugikan masyarakat. “Kepolisian di Sumut ini sangat profesional,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi III Azis Syamsuddin menekankan proses pencegahan korupsi dan narkoba itu dari sisi preventif ditekankan. Dari sisi anggaran preventif ini yang perlu ditingkatkan sehingga pemberantasan korupsi itu tidak terus berulang.

“Ke depan Komisi III akan melakukan peningkatan anggaran untuk bisa mengedepankan sisi preventif,” tegasnya.

(iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Ingin Miliki Perpustakaan Yang Lebih Baik, Pimpinan DPR Kunjungi Gedung BI

DPR RI akan meniru pengelolaan Perpustakaan Bank Indonesia (BI). DPR akan merencanakan dan evaluasi Perpustakaan DPR sebaik mungkin, dan terus belajar dengan BI.

“Perlu nantinya BI memberikan informasi mengenai manajemen Perpustakaan yang terbaik kepada DPR. Perpustakaan DPR diharapkan dapat lebih tertata, mudah dan cepat diakses oleh masyarakat,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto, Senin (24/11), di Gedung BI.

Setya Novanto mengaspresiasi BI usai melihat sendiri mengenai informasi bahwa Gedung BI mempunyai perpustakaan terbaik di Indonesia. Tentunya bagi DPR bercita-cita ingin membuat perpustakaan yang baik sejak jaman pembentukan negara Negara Republik Indonesia, dimana



Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi XI dan Gubernur BI meninjau perpustakaan BI



data mengenai UU, data mengenai pembahasan di tingkat AKD, data mengenai kejadian-kejadian baik yang berkaitan masalah yang besar.

Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi faedah manfaat bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, bagi rakyat tentunya jika ada perpustakaan yang baik seperti Perpustakaan BI, tentunya sangat mudah masyarakat mempelajari hal-hal dan keputusan yang ada di DPR. Dengan Perpustakaan inilah diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Dengan adanya ini (Perpustakaan BI), kita akan meniru sehingga tercipta perpustakaan dengan manajemen baik ditunjang sistem IT yang modern,” jelasnya.

Sedangkan, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) Fadli Zon mengatakan jika

di negara Amerika Serikat terdapat *Library of Congress* (Perpustakaan Kongres Amerika Serikat) adalah Perpustakaan terbesar di dunia. Maka, DPR mengunjungi Perpustakaan BI yang dinilai sangat peduli kepada sejarah dan riset.

DPR menginginkan adanya semua informasi-informasi sejarah, risalah masa lalu yang dikumpulkan menjadi satu. Jika orang mau melakukan riset, ada riwayat utuh hasil sidang AKD, dan semua notulen rapat dapat diakses oleh publik demi kepentingan sejarah tidak ada yang hilang.

“Gagasannya, Perpustakaan DPR RI nantinya lebih spesialis dan ada umumnya juga,” tegasnya.

Gubernur BI Agus Martowardojo memandang bahwa Pimpinan DPR hadir ke BI sekaligus untuk memastikan bahwa perpustakaan penting bagi

institusi. “BI memang sudah dikenal sebagai institusi yang membangun sistem perpustakaan dengan disiplin dan terus menerus meningkatkan kualitasnya,” katanya.

Menurut Agus, untuk mempunyai Perpustakaan yang lebih baik, yang perlu dilakukan adalah mengunjungi beberapa perpustakaan yang memang sudah dikelola dengan baik, dan betul-betul bisa menjalankan fungsinya secara tepat.

Agus menyambut baik, kedatangan Pimpinan DPR yang juga didampingi oleh Pimpinan Komisi XI DPR yang datang untuk melihat keberadaan perpustakaan di BI, yang telah mendapat sertifikasi ISO yang diperoleh, dan itu bisa dijadikan rujukan untuk nantinya dibangun perpustakaan di DPR. (as), foto: rizka/parle/iw.

Pembangunan Berkelanjutan Harus Libatkan Masyarakat

Kesuksesan pembangunan berkelanjutan harus melibatkan masyarakat luas di masing-masing negara. Ego sektoral kerap menjadi pemicu kegagalan pembangunan di belahan dunia. Semua pihak harus terlibat, termasuk parlemen.

Demikian disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, 19 November 2014 lalu. Nurhayati hadir di PBB dalam pertemuan *Annual United Nations Parliamentary Hearing* bersama 160 delegasi parlemen lainnya dari seluruh dunia. Ia hadir bersama Evita Nursanty (F-PDI Perjuangan).

“Kegagalan *Millennium Development Goals* (MDGs) adalah akibat komitmen internasional *top-down* yang dipaksakan. Karena itu perumusan *Sustainable Development Goals* (SDGs) harus melibatkan masyarakat dengan membuatnya sebagai muatan lokal,” kata Nurhayati dalam pertemuan tersebut.

SDGs dapat berhasil, sambung Nurhayati, bila semua pemangku kepentingan, baik parlemen, masyarakat madani, PBB, dan pihak terkait

lainnya, menyatukan upaya bersama dan mengesampingkan ego sektoral. Selain itu, Politisi Partai Demokrat ini, menyampaikan pula keberhasilan DPR dalam membentuk gugus tugas yang membahas MDGs.

“Gugus Tugas MDGs ini terdiri dari seluruh komisi di DPR RI, agar dapat mencakup seluruh aspek pembangunan. Salah satu hasil riil yang telah dilakukan oleh gugus tugas ini adalah diadakannya pertemuan parlemen di tingkat Asia Pasifik mengenai isu MDGs dan Agenda pembangunan pasca-2015.” Pernyataan ini disampaikan dalam sesi pembahasan peran parlemen dalam MDGs.

Annual hearing yang diadakan pada 19-20 November 2014 ini dihadiri oleh anggota parlemen dari seluruh dunia yang bergabung dalam *Inter-Parliamentary Union* (IPU). *Hearing* tahunan ini diselenggarakan atas kerja sama Sekretariat Jenderal PBB, Majelis Umum PBB, dan IPU. Pertemuan ini untuk menyelaraskan pembicaraan di antara para anggota parlemen dunia. Hasilnya diarahkan untuk mendorong pemerintah di masing-masing negara



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf

peserta agar menjalankan kesepakatan ini.

Selain *annual hearing*, delegasi BKSAP DPR RI juga menghadiri *Meeting IPU Bureau on IPU-UN Relations* pada 18 dan 21 November 2014. Kemudian menghadiri pula *UN International Meeting of Parliamentarians in Support of Israeli-Palestinian Peace* pada 21 November 2014.

Dalam pertemuan yang membahas isu perdamaian Israel-Palestina itu, Nurhayati kembali diminta menjadi pembicara. Ia menyampaikan bahwa setidaknya ada beberapa hal penting dalam upaya mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel, termasuk memperkuat kuartet group (PBB, Uni Eropa, AS, dan Rusia). PBB memainkan peran penting di sini. Nurhayati juga menyampaikan dukungan untuk mendapatkan *two-state solutions* dengan *time-frame* yang jelas. (mh, BKSAP), foto: eka hindra/parle/hr.

Komisi VIII Pertanyakan KPAI Hanya Ada di Sembilan Provinsi



Anggota Komisi VIII DPR Abdul Fikri Faqih

Komisi VIII DPR RI mempertanyakan program sosialisasi pengawasan dan kebijakan serta implementasi perlindungan anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang hanya ada di sembilan dari 34 provinsi yang ada.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan KPAI, Senin (24/11) di ruang rapat Komisi VIII, Senayan, Jakarta.

“Kenapa KPAI membuat program perlindungan anak yang diimplementasikan hanya di sembilan dari 34

provinsi yang ada. Karena tentunya seluruh anak Indonesia harus mendapat perlindungan yang sama dari KPAI. Ini harus diseriusi,” ungkap anggota Komisi VIII Abdul Fikri Faqih.

Dilanjutkannya, apa hal tersebut karena terbatasnya anggaran yang diterima KPAI. Sebagaimana diketahui dari 10 miliar alokasi anggaran KPAI 2014 yang disetujui DPR RI, namun karena alasan penghematan direvisi menjadi 7,6 miliar. Jika demikian, menurut Politisi dari Fraksi PKS ini KPAI harus kreatif dan berinovasi ditengah keterbatasan itu.

Ditambahkan anggota Komisi VIII dari Fraksi PPP, Achmad Fauzan Harun, agar bisa membuka perwakilan KPAI di seluruh daerah di Indonesia, maka KPAI harus duduk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) agar bisa menggunakan APBD guna memberikan pengawasan dan perlindungan anak Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPAI, Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa selama ini KPAI konsisten untuk melakukan pengawasan ter-

hadap perlindungan anak Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang. Sekalipun tidak ada anggaran, pihaknya akan tetap terus menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut. Karena sejatinya anak adalah masa depan bangsa kita.

Diungkapkan Wakil Ketua KPAI, Budiharjo bahwa KPAI telah membicarakan dengan Presiden melalui Watimpres terkait perlindungan anak Indonesia, hingga terbitlah Inpres No.5 tahun 2014. KPAI juga telah bekerjasama dengan Apeksi (Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia) terkait dukungan perlindungan anak Indonesia.

Bahkan Sekretaris KPAI Erlinda juga mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan berbagai pihak meski dengan anggaran yang terbatas. Misalnya dengan meminta beberapa stasiun TV untuk membuat program atau acara yang bertujuan mengedukasi masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. (Ayu), foto : andri/parle/iw.

DPR Desak Surat Edaran Seskab Larang Menteri Rapat di DPR Dicabut

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sangat menyayangkan Perintah Presiden Joko Widodo, yang melarang menteri-menteri hadir dalam rapat bersama di DPR. Menurutnya tugas DPR sebagai pengawas dari Pemerintah adalah tugas konstitusional yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa ditunda-tunda.

“Seharusnya tidak boleh ada surat semacam itu, karena surat semacam ini justru mengkhianati demokrasi dan konstitusi,” kata Fadli Zon kepada wartawan saat mengunjungi Gedung BI, (24/11) di Jakarta.

Fadli mengatakan seharusnya Pemerintah memberikan keleluasaan jika memang diperlukan, karena DPR adalah lembaga yang diberikan kewenangan konstitusi untuk mengatur pengawasan, *budgeting*, dan legislasi.

“Kita (DPR RI) harapkan surat itu segera dikoreksi atau dicabut, karena pasti itu akan melanggar konstitusi,” katanya.

Patut diketahui, Surat Edaran itu bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 dan bertanggal 4 November 2014. Surat itu ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto dan ditujukan ke Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf

Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung. Surat Edaran ini beredar di kalangan jurnalis.

Dalam surat itu, Presiden Jokowi meminta agar para menteri dan pejabat setingkatnya menunda pertemuan dengan DPR hingga lembaga wakil rakyat itu telah benar-benar solid. DPR memang telah sepakat islah, namun belum menjalankan poin-poin kesepakatan islah.

Berikut bunyi Surat Edaran Seskab yang beredar, Senin (24/11/2014):

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 3 November 2014, bersama ini dengan hormat kami mohon kepada para Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, Para Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Plt Jaksa Agung untuk menunda pertemuan dengan DPR, baik dengan Pimpinan maupun Alat Kelengkapan DPR guna memberikan kesempatan kepada DPR melakukan konsolidasi kelembagaan secara internal.

Presiden melalui Andi Widjajanto telah membenarkan



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

itu. Hal tersebut tersebut karena internal DPR belum solid sampai saat ini.

Fadli Zon menegaskan bahwa tidak ada urusan Pemerintah dalam soal internal DPR. Dijelaskannya internal DPR sudah cukup solid. Semua sudah berjalan, komisi sudah berjalan dengan baik dan lancar, badan legislati, begitu juga Badan-Badan lainnya.

Jadi tidak ada masalah, karena itu menurutnya Pemerintah tidak perlu turut campur urusan-urusan yang menyangkut DPR, apalagi urusan internal yang itu sangat teknis.

“Jadi apanya yang mau dipersoalkan, kita sangat solid kok. Jangan itu menjadi alasan, justru Pemerintah yang saat ini banyak dianggap menabrak aturan-aturan main, jangan kemudian bersembunyi dibalik persoalan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan itu,” tambahnya.

Selanjutnya, Fadli menghimbau, sebaiknya Pemerintah baca lagi konstitusi, baca aturan main. Jangan merasa kemudian mau menang sendiri, baca aturan main bahwa DPR itu tugasnya adalah mengawasi Pemerintah.

“Surat semacam itu mau mengkhianati demokrasi. Lebih jauh, konsekuensi surat itu adalah Pemerintah tidak mau dipantau oleh DPR. Kalau Pemerintah tidak mau dipantau oleh DPR berarti Pemerintah mengarah kediktatoran,” tegas politisi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Barat V. (as), foto : rizka/parle/iw.

Data KPAI Masih Bersifat Primer

Anggota Komisi VIII DPR RI, Kusbiyanto mempertanyakan data yang disajikan KPAI yang masih bersifat primer dan tidak mendetil. Pasalnya, data tersebut sangat diperlukan untuk mengukur standar keberhasilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama ini. Hal tersebut diungkapkannya dalam RDP (rapat dengar pendapat) Komisi VIII dengan KPAI, Senin (24/11) di Senayan Jakarta.

“KPAI ini bukan sebagai eksekutor tapi lebih kepada pengawasan sehingga seyogyanya apa yang sudah diawasi itu dapat menjadi kontribusi besar baik untuk DPR maupun pemerintah dalam menentukan kebijakan atau regulasi ke depan, tentunya yang terkait dengan perlindungan anak,” ungkap Politisi dari Fraksi PAN ini.

Sayangnya, dilanjutkan Kusbiyanto, selama ini kelemahan dalam semua bidang dan pihak, termasuk KPAI adalah dalam hal data. Ia menilai data yang disampaikan KPAI ke Komisi VIII masih berupa data primer atau data pokok saja, tidak mendetil. Hal ini tentu menjadi sulit untuk bisa mengukur keberhasilan KPAI itu sendiri, karena tidak ada standarisasi yang jelas.

“Seharusnya KPAI punya data berapa kasus yang masuk, berapa yang sudah



Anggota Komisi VIII DPR Kusbiyanto

teratasi dan berapa yang belum teratasi disertai alasannya kenapa belum teratasi. Dari sana akan terlihat peran yang lebih menonjol ada dimana. Sehingga KPAI dapat membuat semacam rekomendasi kepada DPR dan pemerintah untuk membuat atau merevisi yang mungkin saja dalam perkembangan di masyarakat regulasi yang ada sudah tidak sesuai,” paparnya.

Menjawab hal tersebut, Kepala divisi pendataan dan informasi KPAI, Maria Ulfa Anshor mengatakan bahwa selama ini data yang dikumpulkan KPAI beragama, yakni meliputi data yang

masuk lewat pengaduan oleh masyarakat, data yang berasal dari pemantauan di lapangan, serta data skunder yang diperoleh lewat media massa.

“Data-data dari KPAI yang dipublished itu juga digunakan oleh media massa, akademisi bahkan organisasi PBB. Memang tidak semua data bisa ditampilkan, mengingat ada etika tersendiri, apalagi ini menyangkut nasib anak ke depan,” jelas Maria Ulfa.

Atas jawaban tersebut, Kusbiyanto menilai seharusnya tidak ada data yang disembunyikan KPAI. Dengan kata lain seluruh data yang masuk disertai pengawasan dan penanganannya selama itu seharusnya dapat diserahkan kepada DPR dan tentu pihak-pihak yang menginginkannya. Namun khusus untuk kasus tertentu, nama anak bisa disamarkan dengan alasan etika. Hal tersebut semata-mata demi melindungi diri si anak beserta nama baiknya.

“Kalau untuk nama anak saya setuju tidak boleh ditampilkan, namun jumlah atau data kasus yang ada tidak boleh disembunyikan, apalagi kepada DPR. ini untuk mengetahui juga sejauh mana pengawasan serta SOP (standard operational procedure) yang sudah dilakukan KPAI selama itu,” tegas Kusbiyanto ini. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.

Dewan Pengupahan Didesak Konsisten Jalankan Peraturan

Komisi IX DPR mendesak Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan LKS Tripartit Nasional menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan dalam mengembangkan sistem dan mekanisme penetapan pengupahan, termasuk struktur biaya dan kesejahteraan pekerja yang mengikat semua pihak secara hukum.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja RI, Depenas dan LKS Tripartit Nasional dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11/2014).

“Komisi IX DPR juga mendesak Depenas dan LKS Tripartit Nasional dalam memberikan pertimbangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah



Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri

dalam penetapan upah minimum tidak hanya dalam hal kerja layak dan hidup

layak tetapi termasuk komponen-komponen yang melekat di dalamnya antara lain produktivitas pekerja, pendidikan, dan status pekerja lajang beserta keluarganya, sehingga tercapai prinsip upah yang adil dan wajar,” papar Syamsul.

Selanjutnya, politisi Partai Golkar ini memberikan apresiasi atas masukan yang disampaikan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) terkait penetapan upah minimum dan pengupahan.

“Masukan tersebut akan menjadi referensi Komisi IX DPR pada saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan mitra kerja terkait,” kata Syamsul. (sc) foto: iwan armianas/parle/iw.

Seluruh Fraksi Pendukung KIH Sudah Setorkan Nama



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto foto bersama setelah rapat konsultasi

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya menyerahkan nama-nama anggotanya yang akan bertugas di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dua fraksi ini menyusul FP Nasdem dan FP Hanura, pendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang telah menyampaikan daftar nama pada rapat paripurna.

“Iya betul kita sudah menyetorkan nama. Saya sendiri tetap ditugaskan di Komisi II dan Badan Legislasi,” kata anggota FPDIP Arif Wibowo kepada wartawan usai mengi-

kuti Rapat Konsultasi pengganti Bamus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/14).

Ia menyebut setelah daftar nama diserahkan kepada Pimpinan DPR, maka seluruh anggota dewan pendukung Koalisi Indonesia Hebat sudah dapat mengikuti seluruh persidangan. Dalam rapat paripurna (18/11) lalu tidak seperti anggota KIH lainnya, partai banteng gemuk ini memutuskan hanya menyerahkan daftar nama anggotanya di Baleg.

Sementara itu bicara pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyebut penyerahan daftar nama anggota FPDIP dan FPKB di luar sidang paripurna tidak masalah. Hal ini sudah diputuskan dalam rapat sebelumnya.

“Alhamdulillah sudah lengkap, seluruh fraksi sudah menyampaikan nama anggotanya di AKD kepada kesetiaan dan selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR. Ini sudah menjadi kesepakatan, penyampaian daftar itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan pengesahan di paripurna lalu,” katanya kepada wartawan.

Ia berharap kondisi yang baru ini akan membuat dinamika kerja dewan menjadi lebih baik. “Mudah-mudahan semua berjalan lancar, apalagi setelah revisi UU MD3 selesai kita bahas,” demikian Agus. (iky), foto: andri/parle/iw.

Junta Militer Myanmar Masih Terlalu Kuat

Junta militer di Myanmar masih terlalu kuat untuk bisa disingkirkan sama sekali dalam kegiatan politik. Walau ada upaya membersihkan parlemen dari unsur militer, itu masih membutuhkan waktu lama. Untuk itu perlu banyak belajar kepada negara-negara yang sudah berhasil mereformasi parlemennya, seperti Indonesia.

Demikian disampaikan Anggota BKSAP DPR RI Krisna Mukti (F-PKB), Selasa (24/11) usai mengikuti pertemuan dengan delegasi parlemen Myanmar. "Tetap saja junta militer di sana masih kuat pengaruhnya. Jadi, sebagian anggota parlemen yang non militer mereka ingin mendapat masukan dari Indonesia bagaimana melepaskan diri dari sistem militeristik di parlemennya. Mereka minta masukan dan informasi untuk tukar pikiran," kata Krisna.

Sebelum reformasi bergulir tahun 1998, para perwira TNI/Polri aktif masih bisa diangkat sebagai anggota DPR RI. Pasca-reformasi, semua anggota parlemen dipilih langsung melalui pemilu yang demokratis. Anggota TNI/Polri yang ingin menjadi wakil rakyat harus keluar dari institusinya lalu masuk partai politik. Dengan begitu, mereka bisa mengikuti pemilu untuk dipilih secara langsung. "Nah, di Myanmar belum bisa melakukan hal tersebut. Untuk itulah, mereka minta pendapat kita," jelas Krisna.

Kunjungan parlemen Myanmar ke DPR ini untuk belajar lebih jauh bagaimana Indonesia berhasil mereformasi TNI/Polri agar tidak lagi berpolitik. Mereka kini lebih profesional dengan hanya menjaga pertahanan dan keamanan saja. Artis sinetron itu



Anggota BKSAP DPR RI Krisna Mukti

berharap, hubungan bilateral kedua negara jadi semakin kuat dengan kunjungan kali ini. (mh)/foto: iwan armanias/parle/iw.

Parlemen Myanmar Ingin Bersih dari Militer

Politik Myanmar masih dipengaruhi sistem militeristik yang kuat. Hingga beberapa tahun ke depan, masih ada perwakilan militer di parlemennya. Myanmar ingin belajar dari Indonesia dan negara-negara demokratis lainnya agar parlemennya bersih dari keanggotaan militer aktif.

Demikian mengemuka dalam pertemuan antara delegasi parlemen Myanmar dengan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) di DPR, Selasa (25/11). Delegasi parlemen Myanmar dipimpin U N Hpnau Gam mengungkapkan, Myanmar ingin merubah konstitusinya agar militer secara perlahan bisa keluar dari parlemen seperti di DPR. Kecuali mereka berhenti dari dinas militer dan masuk partai politik.

Delegasi Myanmar diterima Wakil Ketua BKSAP DPR Rofi'Munawar. Hadir pula para anggota BKSAP di antaranya Andi M Galib, Melani Suharli, Siti Hediati Soeharto, Rachel Maryam, Arif Suditomo, dan Prananda Surya Paloh. Hadir pula anggota Baleg Desy Ratnasari. BKSAP sengaja mengun-



Wakil Ketua BKSAP DPR Rofi'Munawar foto bersama dengan Delegasi Parlemen Myanmar

dang Baleg dan Komisi II DPR dalam pertemuan tersebut, karena banyak pertanyaan yang diajukan parlemen Myanmar seputar proses pembahasan UU di DPR.

Myanmar sendiri kini masih dikuasai Junta Militer. Masih butuh waktu untuk merubah konstitusi yang menginginkan militer tidak berpolitik dengan menjadi anggota parlemen. Dalam pertemuan tersebut parlemen Myanmar mengapresiasi Indo-

nesia yang mampu merubah wajah militernya menjadi lebih profesional dengan hanya mengurus pertahanan.

Selain ke Indonesia, delegasi Myanmar juga berkunjung ke parlemen Australia dan negara-negara Asia lainnya untuk menimba banyak pengetahuan seputar konstitusi dan militer. Parlemen Myanmar ingin melakukan perubahan gradual menyangkut UU bidang politiknya. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.



Warna-warni

Damai Itu Indah



Jepang Giatkan Investasi di Indonesia

Indonesia dinilai Jepang sebagai negara tujuan investasi paling menarik. Terbukti banyak perusahaan besar Jepang menanamkan investasinya di Indonesia, terutama sektor industri. Investasi Jepang di Indonesia pada 2013 mencapai 4,37 miliar USD.

Demikian terungkap saat Ketua DPR menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Taniza, Senin (24/11). “Di tahun-tahun mendatang investasi Jepang diharapkan terus meningkat, terutama dengan dibukanya investasi di bidang maritim sebagai prioritas kedua negara,” kata Ketua DPR Setya Novanto dalam pertemuan tersebut.

Menurut Dubes Jepang Yasuaki Taniza, kegiatan investasi di Indonesia bergantung pada kondisi stabilitas politik dan ekonomi Indonesia sendiri. Pada pertemuan APEC di Beijing, Tiongkok, Presiden Joko Widodo sudah bertemu PM Jepang Shinzo Abe yang salah satu pembicaraannya soal investasi kedua negara. Yasuaki berharap, UU investasi Indonesia mesti diperbaiki kembali mengikuti perkembangan iklim investasi yang ada.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut dua Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto dan Fadli Zon. Menurut Agus, UU investasi di Indonesia sudah disusun sebaik mungkin. Malah UU itu oleh sebagian kalangan dinilai terlalu liberal. Sementara Fadli Zon menambahkan bahwa Jepang memiliki pasukan penjaga laut yang kuat. Untuk itu perlu membangun



Ketua DPR RI Setya Novanto memberikan cinderamata kepada Dubes Jepang

kerja sama di saat Pemerintah Indonesia memberi perhatian lebih pada sektor maritim.

Saat ini investasi Jepang banyak di sektor otomotif. Yasuaki mengungkapkan, akan membantu ekspor kendaraan dari Indonesia ke negara ke tiga. Novanto mengapresiasi langkah ini. Kepada Yasuaki, Novanto mengharapkan agar Jepang juga membantu Indonesia untuk membangun pabrik industri kendaraan dan memberi pelajaran alih teknologi kepada putra putri Indonesia. (mh) foto: naefuroji/parle/iw.

OJK Harus Membuka Perwakilan di Semua Daerah



Ketua DPR RI Setya Novanto saat menerima Ketua OJK Muliawan D Hadad

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus membuka perwakilannya di semua daerah di Indonesia, agar pengawasan terhadap industri jasa keuangan kian membaik. OJK juga diharapkan memantau perizinan jasa keuangan di daerah.

Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan hal tersebut usai menerima Ketua OJK Muliawan D Hadad di ruang kerjanya, Senin (24/11). “Sejak UU No.21/2011 tentang OJK, saya melihat OJK sudah mulai betul-betul maju secara

signifikan khususnya yang menyangkut pengawasan, baik pengawasan perbankan, perasuransian, dan juga masalah saham,” ujar Novanto.

Disampaikan Novanto, pihaknya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan OJK hingga saat ini. Untuk itu, lembaga seperti OJK harus betul-betul tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Pembukaan perwakilan di daerah, akan membantu pertumbuhan industri secara signifikan.

“Tentu saya mengapresiasi dan menyambut baik, apa yg dilakukan Direksi OJK. Kami sebagai Pimpinan DPR akan mengawal terus, mendorong supaya OJK bisa betul-betul tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di provinsi-provinsi yang sekarang belum ada cabang OJK. Dengan adanya OJK di seluruh Indonesia, maka kita harapkan tumbuhnya industri-industri bisa memberikan kontribusi besar,” ungkapnya.

Dengan pengawasan yang efektif dari OJK, sambung Novanto, tentu akan memberikan dampak positif bagi kepentingan pemerintah dan dunia usaha. Sementara Ketua OJK menyampaikan bahwa kedatangannya ke DPR untuk memperkenalkan diri dan rombongannya kepada Pimpinan DPR yang baru. Ruang lingkup kerja OJK, katanya, perlu diketahui masyarakat secara luas. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Komisi III DPR Soroti Kasus Korupsi dan HAM di Sumut

Komisi III DPR RI menyoroti kasus Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM), karena banyak kasus korupsi yang sudah disidik namun masih jalan di tempat, dan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam hal penyidikan.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPR Wenny Warouw dari Fraksi Partai Gerindra kepada wartawan disela-sela pertemuan dengan Kapolda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jum'at (21/11).

“Masih ada kasus yang jalan di tempat seperti kasus Asahan dan lainnya,” kata Wenny seraya menambahkan kalau itu sudah dalam kasus pro-justisia sudah masuk P19 kejaksaan bisa segera dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dia sudah harus P21 supaya sorotan dari masyarakat itu melihat jempol.

Menurutnya, Komisi III datang kesini karena ada hal-hal yang sudah baik tapi ada hal-hal juga yang masih perlu perbaikan, baik dari unsur Kejaksaan maupun unsur Kepolisian. “Itu dari segi penyidikan Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor),” jelasnya.

Menyinggung masalah HAM, Wenny mengatakan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam hal penyidikan. Banyak sekali masyarakat yang mendatangi Komisi III DPR, bukan hanya dari Sumut. Mereka mengadu karena hak asasi mereka itu dilanggar, ada perkara yang sudah bertahun-tahun tapi P19-nya jalan di tempat.

Oleh karena itu, lanjutnya, Komisi III DPR akan masuk ke seluruh Indonesia tapi kita mulai dari Sumut untuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum. Itu yang disampaikan oleh pemerintah sekarang “kerja, kerja, kerja,” Komisi III dalam track yang seperti itu, tegasnya.

Saat ditanya berkaitan dengan proses seleksi calon-calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Politisi Partai Gerindra ini mengatakan kita sudah minta masukan-masukan dari Kejati seluruh Indonesia dan dari Polda seluruh Indonesia. Kira-kira kriteria yang harus dimiliki seorang



Anggota Komisi III DPR Wenny Warouw

pimpinan KPK dalam rangka menjadi pemimpin untuk memberantas korupsi ke depan. Itu sudah digambarkan dan kita mulai dari Kejati dan Polda Sumut ini, dan itu akan kita jadikan bahan di Komisi III setelah itu kita akan elaborasi bersama-sama dengan panitia penyeleksi dan Menkumham.

“Yang jelas pimpinan KPK itu harus profesional, jujur, berani, dan bukan berasal dari parpol sesuai dengan harapan masyarakat. Jangan seperti yang terjadi sekarang ini memilih Jaksa dari parpol,” jelasnya. (iw)/foto: iwan armanias/parle/iw.

Penyandang Disabilitas Berhak Atas Pekerjaan



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak

Para penyandang disabilitas berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Semua kementerian

harus terbuka menerima penyandang disabilitas untuk pekerjaan yang diminati sesuai kompetensinya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak menyampaikan hal tersebut kepada pers. Ia mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah tepat untuk pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas. “Hak-hak bagi para penyandang kebutuhan khusus ini harus dipenuhi di semua fasilitas umum, sama halnya dengan fasilitas yang diberikan kepada setiap warga negara,” katanya, Kamis (20/11).

Sesuai Pasal 7 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. saat ini saja sarana publik, nilai Deding, belum ramah bagi penyandang disabilitas. “Banyak fasili-

tas umum, seperti jalan, pasar, atau terminal yang tidak ramah bagi para penyandang disabilitas,” katanya.

Komisi VIII terus mengkaji aturan hukum yang melindungi kaum disabilitas. “Kami tentu akan senantiasa memperhatikan masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau memang perlu kami juga akan merevisi UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas,” ujarnya.

Politisi Golkar ini, mengapresiasi langkah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang memberi kesempatan sama kepada para penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan. Kementerian lain pun harus demikian, harapnya. Di bidang pendidikan, misalnya, penyandang disabilitas juga berhak untuk menjadi guru, dosen,

bahkan menjadi rektor.

Dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi VIII dengan berbagai kelompok penyandang disabilitas beberapa waktu lalu, terungkap bahwa penanganan terhadap penyandang disabilitas belum terkoordinasi dengan

baik antar-kementerian, sehingga perlu koordinasi dan sinergi yang lebih baik.

“Program disabilitas harus bersifat inklusif dan mencerminkan perlakuan yang layak bagi para penyandang disabilitas sebagai warga negara.

Sebab tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat umum tersebut. (mh,ant), foto: andri/parle/iw.

Ketua DPR Sambut Baik Forum Perdamaian Dunia



Ketua DPR RI Setya Novanto saat memberikan sambutan pada acara forum perdamaian

Forum Perdamaian Dunia yang digelar organisasi Muhammadiyah disambut baik oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. Inilah forum yang menyatukan lintas agama untuk menyatukan pandangan dan aksi perdamaian.

Dalam sambutannya di Hotel Atlet Century, Jumat malam (21/11), Novanto menyampaikan, pertemuan lin-

tas agama untuk perdamaian ini dapat menciptakan masyarakat yang damai dan saling menghargai satu sama lain. “Ini acara yang bagus sekali dan luar biasa,” kata Novanto, saat jamuan makan malam.

Acara forum perdamaian ini sendiri sudah digelar yang kelima kali oleh Muhammadiyah sejak 2006. Acara

bertajuk *The 5th World Peace Forum* ini, dihadiri oleh para delegasi dari berbagai negara, baim Eropa, Asia, dan Afrika. Dikatakan Novanto, saat ini dunia disuguhkan informasi yang sangat terbuka. Informasi itu bisa membawa manfaat atau madarat. Kadang, informasi juga membawa konflik di tengah masyarakat.

Untuk itu, pesan perdamaian dari pertemuan ini sangat penting, agar para pemimpin agama dapat persepsi yang sama tentang pentingnya perdamaian dan menghindari konflik. Muhammadiyah telah memfasilitasi pertemuan ini dengan baik. Muhammadiyah, kata Novanto, telah melahirkan banyak tokoh pemersatu yang cinta perdamaian. “Muhammadiyah ikut memajukan Indonesia lewat pendekatan agama.”

Sementara itu Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mengatakan, pertemuan seperti ini akan selalu diadakan untuk memperkuat ikatan perdamaian dengan masyarakat dunia lintas agama. “Kita terus meneruskan. Ini kali yang kelima sejak 2006. Oleh karena itu apa yang disampaikan ketua DPR itu sangat baik. Secara personal saya ingin menyampaikan kebahagiaan bahwa sahabat baik saya ini jadi ketua DPR. Dan lebih bahagianya lagi DPR-nya sudah bersatu.” (mh) foto: naefuroji/parle/iw.

Menkumham Tidak Datang, Komisi III Lanjutkan Rapat

Komisi III DPR mempertanyakan keseriusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly dalam membahas seleksi Calon Pimpinan KPK karena untuk kedua kalinya tidak

hadir memenuhi undangan. Dalam rapat tersebut disepakati komisi yang membidangi masalah hukum ini akan terus bekerja walaupun menteri tidak datang.

“Berdasarkan surat yang kami terima, saudara menteri tidak bisa datang. Mengingat waktu pelaksanaan seleksi yang begitu mepet, kami akan mengundang kembali saudara menteri atau



Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin

mengabaikan saudara menteri,” kata Ketua Komisi III Aziz Syamsudin yang memimpin jalannya rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/14).

Ia menyebut Menkumham sudah dua kali tidak hadir memenuhi undangan Komisi III dalam agenda yang sama. Kehadiran Menkumham menurutnya penting untuk menjelaskan sejumlah isu sebelum uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua kandidat Pimpinan KPK dilaksanakan.

“Menkumham sudah kita panggil dua kali, nanti ada pemanggilan ketiga, kalau masih tidak datang kita gunakan mekanisme lain sesuai UU no.17 tahun

2014 tentang MD3,” tegasnya.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III dari FPD Erma Suryani Ranik mengatakan agenda pemilihan Pimpinan KPK sangat penting, untuk mengisi kekosongan posisi salah satu Wakil Ketua yang berakhir masa jabatannya.

“Kita minta Menkumham serius menyikapi ini. Busyro Muqoddas akan berakhir masa jabatannya 10 Desember sementara DPR memasuki masa reses 5 Desember. Jadi uji kepatutan dan kelayakan Pimpinan KPK ini mendesak untuk segera dipilih,” pungkias dia. (iky), foto : andri/aprle/iw.

Revisi UU MD3 Fokus Pada Nota Kesepahaman KIH dan KMP

Pembahasan revisi UU MD3 difokuskan pada pasal-pasal yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Pasal-pasal yang akan direvisi tersebut antara lain Pasal 74, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152.

“Memang ini harus mendapatkan suatu pemahaman bersama bahwa harmonisasi terhadap revisi UU MD3 ini yang telah disepakati DPR kemarin itu fokus kepada Pasal-pasal yang disepakati dalam nota kesepahaman antara KMP dan KIH,” terang Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo pada media di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Revisi UU MD3 yang merupakan kesepakatan antara KIH dan KMP ini menjadi suatu kompromi politik dimana ada pasal-pasal yang harus disempurnakan. “Dengan adanya harmonisasi di Baleg DPR ini, insyaallah setelah selesai akan di bawa ke paripurna agar DPR normal kembali,” jelas Firman.

Namun tentunya didalam harmonisasi ini, jelasnya, tetap mengacu kepada mekanisme pembahasan UU.

Tujuan revisi UU MD3 ini, kata Firman, adalah agar DPR segera kembali pada posisi normal dan meneruskan agenda-agenda politik yang ada di DPR.

Dijelaskan Firman, didalam perkembangannya terkait revisi UU MD3 tersebut, ada masukan dari DPD RI, bahwa DPDD berkeinginan terlibat didalam harmonisasi UU ini. Karena ada beberapa pasal-pasal yang dimasukkan yang dikaitkan dengan keputusan MK.

“Namun kita belum tahu persis substansinya, nanti malam ada pertemuan antara Pimpinan DPD RI dengan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Baleg untuk konsultasi,” jelasnya.

“Nanti malam kita dengarkan. Kalau memang itu ternyata hanya itu yang diinginkan, tentunya akan menjadi pertimbangan. Tapi kalau itu melebar, tentunya kita akan masukan dalam prolegnas 2015-2019,” tambah politisi Fraksi



Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo berdialog dengan anggota F-PDI Perjuangan Arif Wibowo

Partai Golkar ini.

Terkait revisi UU MD3, menurut Firman mengacu pada Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa ada perlakuan khusus keadaan tertentu dimana pemerintah dan DPR memiliki kewenangan untuk menyusun UU.

“Ini juga yang dipertanyakan oleh beberapa orang, apakah kesepakatan koalisi ini dianggap sesuatu hal yang luar biasa,” imbuhs Firman. (sc), foto : andri/parle/iw.



Pimpinan Baleg DPR saat penandatanganan pembentukan Panja Revisi UU MD3

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR (Baleg) hari ini, Senin (24/11/2014) membentuk panitia kerja (panja) revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa disepakati menjadi ketua panja revisi UU MD3.

Saan Mustopa Ditetapkan Sebagai Ketua Panja Revisi UU MD3

“Jadi sepakat ya dengan anggota Panja yang sudah diumumkan? Untuk itu nanti akan diketuai oleh Pak Saan (Mustopa). Jadi apakah akan langsung rapat Panja?” ujar Ketua Baleg Sarehwiyono saat memimpin Rapat Pleno Baleg pembentukan Panja RUU MD3, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Sebelumnya Sareh mengumumkan nama-nama anggota Panja yang juga anggota Baleg. Kemudian Sareh menutup Rapat Pleno Baleg, rapat dilanjutkan dengan rapat Panja.

“Setelah ini boleh istirahat 10 menit sebelum mulai rapat Panja. Rapat Panja nanti sifatnya tertutup saja,” imbuh Sareh setelah mengetok palu. (sc), foto: naefurodjie/parle/iw.

Kendala Teknis Menghambat Penerapan Kurikulum 2013 di Kalbar



Wakil Ketua Komisi X Sohibul Iman

Penerapan Kurikulum 2013 secara substantif sangat bagus. Kendala justru muncul dari sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti belum terselurkannya buku pelajaran secara merata hingga ke pelosok daerah, hingga belum siapnya perangkat IT (komputer) sebagai salah satu prasyarat sarana pendukung.

Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI berdiskusi dengan Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Kalimantan Barat, Kamis malam (27/11).

Bertempat di Aula Kantor Gubernur Kalbar, Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Sohibul Iman diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya yang didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Alexius Akim serta beberapa Kepala Sekolah setempat.

“Kami datang untuk mendengar langsung permasalahan yang dihadapi terkait penerapan Kurikulum 2013 terutama di Provinsi Kalbar,” ungkap Sohibul dalam sambutannya.

Lebih lanjut, politisi PKS ini juga mengharapkan para pejabat terkait hingga guru-guru dan Kepala Sekolah memberikan informasi apa adanya terkait polemik Kurikulum 2013. Dirinya berjanji akan meneruskan informasi yang dihimpun kepada pemerintah pusat yaitu Menteri Pendidikan.

“Seperti Bapak/Ibu lihat di media massa, hingga kini kami memang belum pernah rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, namun demikian data dan informasi yang kami peroleh dari sini akan menjadi bahan penting saat bertemu Pak Menteri,” jelas Sohibul.

Di lain pihak, Wakil Gubernur Kalbar

Christiandy Sanjaya mengharapkan hasil diskusi dengan Komisi X DPR RI bisa membantu mempercepat penyelesaian kendala-kendala terkait penerapan Kurikulum 2013.

Sementara itu, Alexius Akim selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar mengakui secara substantif Kurikulum 2013 sangat baik dan relatif tidak ada masalah bagi guru-guru di wilayahnya. “Kendala justru terjadi karena belum terselurkannya buku pelajaran secara merata ke seluruh Kalbar,” ujarnya.

Alexius mengungkapkan bahwa perusahaan pencetak buku mendistribusikan buku-buku tersebut hanya sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak langsung sampai ke sekolah-sekolah sesuai perjanjian kontraknya.

Tim Kunker Spesifik dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Sohibul Iman (F-PKS) didampingi Zulfadhli (F-PG) Ferdiansyah (F-PG), Elion Numbri (F-PG), Sutan Adil Hendra (FP-Gerindra), Jefirstson R Riwu Kore (F-PD), Laila Istiana (F-PAN), Lathifah Shohib (F-PKB), Reni Marlinawati (F-PPP), dan Taufiqulhadi (FP-Nasdem). (oji) foto:

iwana armanias/parle/iw

Panja Kurikulum Komisi X DPR Kunjungi Jawa Timur

Terkait perkembangan implementasi Kurikulum 2013, Panja Kurikulum Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisyam mengunjungi Surabaya, Jawa Timur. “Panja akan melihat secara langsung implementasi Kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya,” kata Ridwan kepada Parlemen di Surabaya, Jumat (28/11).

Ia menambahkan, Panja Komisi X ini utamanya akan mencari masukan terutama mengenai masalah kebijakan yang mengatur Kurikulum 2013, penguatan lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, kesiapan SDM (guru), kelengkapan dokumen Kurikulum 2013, buku pedoman tenaga pendidik dan siswa, serta alokasi APBN/APBD.

Oleh karena itu, jelas politisi Partai Golkar ini, Panja Kurikulum Komisi X hari ini akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur, Pimpinan DPRD, Kadis Pendidikan dan Kebu-



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisyam

dayaan, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan, Ketua LPMP, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua PGRI, Ketua LPTK, kepala sekolah dan guru yang melaksanakan Kurikulum 2013 serta instansi terkait lainnya.

Ridwan mengharapkan, dari kunjungan ini akan mendapatkan masukan

yang konstruktif. “Sehingga implementasi kurikulum 2013 ini merupakan langkah yang tepat sebagai jawaban berbagai persoalan pendidikan di Indonesia,” imbuhnya.

Selain menurunkan tim ke Jawa Timur, di waktu yang sama, Panja Kurikulum Komisi X juga menurunkan timnya ke Aceh dan Kalimantan Barat. Tim kunjungan Spesifik Panja Kurikulum Komisi X ke Aceh dipimpin Ketua Komisi X Teuku Rifky Harsa dan Tim Kunjungan Spesifik Panja Kurikulum Komisi X ke Kalimantan Barat dipimpin Wakil Ketua Komisi X Sohibul Iman.

Kunjungan ke Jawa Timur diikuti antara lain Wakil Ketua Komisi X Nuroji, Anggota Komisi X Popong Otje Djundjuran, Salim Fakhry, Adi Rio Idris Pandjalangi, Ida Bagus Putu Sukarta, Jamal Mirdad, Vena Melinda, Eko Hendro Purnomo, Anang Hermansyah, Yayuk Basuki, Nur Hasan Zaldi, Elviana, Anas Thahir, Kresna Dewanata Phrosakh, Rinto Subekti dan Dadang Rusdiana.

(sc) foto: iwan armanias/parle/iw

Rencana Impor Sapi Lukai Para Peternak



Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir

Rencana Presiden Joko Widodo mengimpor 264 ribu ekor sapi dari Australia pada tahun ini telah melukai hati para peternak sapi di Tanah Air. Padahal, saat kampanye dulu, di Pasar Cipanas Cianjur, Jokowi berjanji akan menghentikan impor daging sapi.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) di DPR, Kamis (27/11). Hafisz mengungkapkan, Presiden Jokowi dulu sempat menyatakan, Indonesia harus punya keberanian menghentikan impor daging sapi, karena peternak lokal mampu swasembada untuk memperkuat produksi di dalam negeri. Bahkan, Jokowi juga sempat mengatakan, Indonesia harus berubah dari konsumen sapi menjadi produsen sapi.

Pemerintah, nilai Hafisz, mengingkari janji kampanyenya. “Jokowi bagai-

kan menelan ludah sendiri. Jumlah impor kali ini melonjak sangat tajam dari target awal 136 ribu ekor menjadi 264 ribu ekor sapi. Celaknya lagi, sapi tersebut diimpor dari negara bagian Queensland, Australia yang kemarin menjadi tuan rumah G20, tempat Jokowi hadir sebagai Presiden RI,” papar Hafisz.

Ditambahkan Hafisz, inkonsistensi selalu ditunjukkan Presiden Jokowi. “Baru sekali ketemu di forum dunia kita sudah kalah lobi. Presiden lupa bahwa ada hal yang lebih mendasar yang harus diperjuangkan, yaitu menjadikan peternak sapi menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bila kebijakan ini diteruskan, bagaimana peternak sapi kita bisa exist?” (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Ketua DPR Lantik Pengurus PIA Periode 2014-2019



Ketua DPR RI Setya Novanto memberikan ucapan selamat kepada Ketua PIA Deisti A. Novanto

Ketua DPR RI, Setya Novanto melantik kepengurusan PIA (Persaudaraan Istri Anggota) DPR RI, Rabu (26/11) di Gedung Pustakaloka, Senayan Jakarta. Dalam sambutannya, Novanto menjelaskan bahwa tugas dan peran suami sebagai anggota DPR yang notabene merupakan wakil rakyat tidaklah mudah, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Di sinilah perlunya peran dan dukungan dari istri.

“Peran istri sangat besar bagi perkembangan karir suami, bahkan istri menjadi pendukung utama tugas dan peran suami baik sebagai pemimpin keluarga juga sebagai anggota DPR,” ujar Ketua DPR RI, Setya Novanto dalam sambutannya.

Dilanjutkan Novanto, lebih jauh istri (anggota PIA) berperan strategis dalam pendidikan dan perkembangan masyarakat luas. Dengan demikian diharapkan segala program yang telah disusun baik untuk keanggotaan PIA itu sendiri maupun program social untuk masyarakat luas dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Novanto menjelaskan bahwa saat ini DPR sudah jauh lebih solid dari sebelumnya, yakni sudah tidak ada lagi KIH dan KMP. Melainkan yang ada keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat yang mengemban amanat dan aspirasi rakyat. Ucapan Ketua DPR tersebut langsung disambut tepuk tangan yang meriah dari para anggota PIA juga undangan yang hadir.

Bahkan di era parlemen modern saat ini, segala kegiatan keparlemenan dari DPR RI, termasuk PIA dapat dengan mudah di akses melalui berbagai jaringan pemberitaan di DPR, seperti website resmi DPR, Buletin Parlemen, Majalah Parlemen, TV Parlemen, bahwa Sosial Media seperti Twitter dan Facebook. Dengan demikian semuanya sangat terbuka dan diharapkan bisa mendapat *feed back* positif juga dari masyarakat.

Pada kesempatan itu, tak lupa Ketua DPR RI, Setya No-

vanto menyematkan Pin Keanggotaan PIA kepada Ketua PIA yang baru saja dilantik, Deisti Novanto yang tak lain adalah sang istri sendiri. Menanggapi sambutan Ketua DPR RI tersebut, Ketua PIA yang baru saja dilantik, Deisti A Novanto bersyukur bahwa kepengurusan PIA periode 2014-2019 telah diresmikan. Bahkan Deisti juga bersyukur bahwa pada dasarnya anggota PIA (istri anggota) sudah jauh lebih solid, karena pada dasarnya terbentuknya PIA itu sendiri sebagai sebuah ajang silaturahmi antar istri anggota, disamping juga ada misi-misi sosial yang tetap harus dijalankannya.

“PIA tidak bisa menunggu lama untuk segera menjalankan program-program yang telah disusun. Dalam waktu dekat kami juga akan langsung mendatangi beberapa daerah yang tengah terkena bencana. Meski tidak banyak yang bisa kita perbuat, namun paling tidak keberadaan PIA akan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang tengah terkena bencana,” papar Deisti Novanto.

Sementara itu Wakil Ketua PIA bidang Pengembangan dan Kerjasama Humas dan Media, Katharine Grace Fadli Zon meyakini di bawah kepemimpinan Ketua PIA yang baru, Destia PIA akan semakin berkembang dan semakin sukses dalam menjalankan program-programnya. Hal ini terbukti dengan hadirnya tujuh puluh lima persen anggota PIA dalam pelantikan pengurus PIA kali ini.

“Alhamdulillah hampir tujuh puluh lima persen anggota PIA dari sepuluh fraksi ikut menghadiri pelantikan kepengurusan baru ini. Ini sebuah langkah yang baik bagi kepemimpinan bu Deisti ke depan. Karena memang pada dasarnya PIA ini bukan pure organisasi politis, namun sebagai ajang silaturahmi disamping ada tugas-tugas mulia lainnya yang harus dijalankan PIA untuk masyarakat luas dan untuk bangsa secara keseluruhan,” ujar Grace Fadli Zon.

(Ayu) foto: rizka/parle/iw



Rapat Internal Baleg DPR RI dipimpin Ketua Baleg Sarehwiyono membahas rencana Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rabu (19/11) Foto: Iwan Armanias/Parle/iw



Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI dengan BPH Migas dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi, Rabu (19/11)Foto: Naefurodjie/parle/iw



Kunjungan spesifik Komisi III DPR RI ke Rutan Medaeng Surabaya dan Mapolres Sidoarjo, (14/11), Foto: Rizka/Parle/iw